



Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](https://doi.org/10.24127/jk.v6i2.3915) and e-ISSN : [2722-7804](https://doi.org/10.24127/jk.v6i2.3915)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam pada Pembangunan Ekonomi

Dewi Maharani

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

dewimaharani922@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3915>

Abstract

Islam in economics is required to be able to contribute to the global economy. This paper aims to analyze monetary policy in the perspective of Islam in economics in view of the country's economic development. Monetary policy is a branch of economics that influences the country's economy. Monetary in Islam not only emphasizes the supply and demand for money, but also the principle of equity, equality and creating a fair distribution of wealth and income. This study uses literature studies, namely theoretical studies and references related to values, culture and norms that develop in the social situations studied. In this research, the writer chose to study literature or study literature by collecting reference books related to research. This research study is the implication of Islam in monetary policy on economic development in Indonesia. Monetary policy can maintain economic stability by balancing the amount of money in circulation widely and in balance. If any money in circulation is greater or less than a number of goods and services, then the economy in a country will have a negative impact.

Keywords: Monetary Policy, Islam in Economics, Economic Development.

Abstrak

Ekonomi Islam dituntut untuk dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian secara global. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dalam melihat pembangunan ekonomi negara. Kebijakan moneter adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berpengaruh pada perekonomian negara. Moneter dalam Islam bukan hanya menekankan pada penawaran dan permintaan uang, tetapi juga prinsip pemerataan keadilan, kesetaraan dan menciptakan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil. Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memilih studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengumpulkan referensi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Kajian penelitian ini adalah implikasi kebijakan moneter Islam pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas perekonomian, dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar secara luas dan seimbang. Jika setiap uang yang beredar lebih besar atau lebih kecil dari sejumlah barang dan jasa maka dari itu perekonomian di suatu Negara akan berdampak buruk.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam, Pembangunan Ekonomi.

Pendahuluan

Kebijakan moneter Islam dalam skala pembangunan ekonomi mengacu pada

mekanisme yang sesuai pada prinsip-prinsip syariah dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan serta kemaslahatan umat.

Pada dasarnya ekonomi Islam mengacu pada Alquran dan Hadist, dimana banyak larangan-larangan yang harus kita perhatikan, misalnya terkait pada riba. Kebijakan moneter dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi dikarenakan kebijakan ini memungkinkan bank sentral untuk mengendalikan tingkat suku bunga dan pasokan uang pasar keuangan. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian daerah dilihat dari adanya penurunan tekanan jumlah uang beredar dan meningkatnya suku bunga.¹ Dalam sistem Islam struktur kelembagaan moneter itu sama dengan yang ada, tetapi Islam memiliki model operasional dalam sistem bebas bunga yang berbeda, yaitu:²

1. Bank Sentral dan Pemerintah (Otoritas Moneter)

Sistem ekonomi Islam bank sentral dipercaya sebagai pengelola persediaan uang yang menentukan program tahunan pertumbuhan persediaan uang yang diharapkan sebagai tujuan ekonomi nasional. Sistem operasional yang digunakan dalam mendistribusikan uang yang beredar tetap harus bebas bunga. Bank sentral akan membuka rekening investasi di bank-bank lain sebagai deposito mudarabah.³

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan misalnya perusahaan asuransi, kantor pos, dengan otoritas moneter nya bersama-sama dengan lembaga keuangan. Islam tidak mengenal lembaga keuangan konvensional namun lembaga keuangan yang berbasis syariah.

3. Masyarakat

Manajemen moneter Islam merupakan pengelola moneter yang berbasis pada nilai Islam yang diharapkan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memilih studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.⁵

Pembahasan

¹ Safuridar, "Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomika* 02, no. 01 (n.d.).

² Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan, "A Survey of Issues And Programme For Reseachr In Monetary And Fiscal Economics of Islam," *Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz University*, 1981, 19–21.

³ Nanang Sobarna, "Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial* 01, no. 02 (n.d.).

⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

1. Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi moneter dalam Islam tertuju kepada sumber daya ekonomi, sedangkan dalam ekonomi konvensional bank sentral dirancang untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial yaitu suku bunga dan tingkat penawaran uang. Kebijakan moneter berfungsi mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak menimbulkan inflasi sehingga menurunkan daya beli masyarakat.⁶

Pada masa Rasulullah perekonomian sudah mengenal valuta asing dari Persa dan Romawi yang dikenal oleh seluruh masyarakat Arab dan menjadi alat bayar yang resmi yaitu dikenal dengan dinar dan dirham. Pada masa itu apabila peminat uang meningkat maka dinar dan dirham di impor, nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya. Dalam mencapai fungsi sistem moneter secara baik harus dilakukan pengawasan secara keseluruhan pada semua sistem. Dalam Islam kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, terciptanya lingkungan ekonomi dalam memanfaatkan waktu, kemampuan dalam pengayaan diri, keluarga dan masyarakat baik fisik maupun mental. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah sebagai khalifah Allah. Maka dari itu, manusia hidup secara berkelompok dan saling membutuhkan.
- b. Pendapatan terdistribusi secara merata melalui konsep adil. Adil merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya, dengan keseimbangan dan perbandingan antara hak kita dengan orang lain dengan seksama. Pendapatan yang terdistribusi sesuai konsep adil direfleksikan karena adanya imbalan yang wajar atas kinerjanya (jerih payah).
- c. Stabilitas nilai uang menjadi prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang akan berpengaruh pada ekonomi negara, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

2. Prinsip Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:⁷

- a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah karena Allah memiliki yang absolut.
- b. Manusia merupakan khalifah di bumi, namun manusia bukanlah pemilik yang sebenarnya

⁶ Zsasa Aulia Hubara & Surya Alfi Nurrahma Nurul Jannah, "Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia," *Journal Of Management, Accounting, Economic dan Business* 02, no. 04 (2021).

⁷ A. Wahyudi, "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip - Prinsip Islam .," *Justicia Islam ica* 10, no. 01 (2013).

- c. Semua yang diperoleh oleh manusia atas izin Allah, maka dari itu ingatlah pada orang-orang yang kurang beruntung. Berbagilah pada mereka karena sebagian dari rezeki yang kita miliki adalah hak mereka.
- d. Kekayaan tidak boleh ditimbun, karena Islam melarang menimbun kekayaan. Menimbun kekayaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- e. Kekayaan harus diputar karena pengelolaan kekayaan dalam Islam untuk mendorong perputaran uang yang cepat agar harta yang dimiliki tidak beredar diantara orang-orang kaya saja.
- f. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dengan menghapus konflik antara golongan
- g. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk kepada golongan orang-orang miskin.

3. Instrumen Kebijakan Moneter dalam Islam

Kebijakan moneter dalam Islam secara prinsip tidak jauh berbeda dengan tujuan kebijakan ekonomi moneter konvensional yaitu sama-sama menjaga stabilitas mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas nilai uang tidak hanya terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia, dan hal tersebut tertuang dalam AL Qur'an dalam QS.Al.An'am:152

"..... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. ..."

Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam terkait pada stok uang dan sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.⁸ Hal tersebut ditegaskan menuju sistem moneter yang adil.

Walaupun tujuan ekonomi moneter secara prinsip tidak jauh berbeda, namun ekonomi moneter Islam memiliki instrumen yang berbeda dengan ekonomi moneter konvensional. Perbedaan mendasar antar kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariahnya yang tidak membenarkan adanya jaminan terhadap nominal maupun rate return (suku bunga). Apabila hal tersebut dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.

Instrumen moneter syariah adalah hukum syariah, sebagian besar instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. Maka dari itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam . Namun, sejumlah instrument

⁸ M. Umer Chapra, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam pada Pembangunan Ekonomi – Dewi Maharani

kebijakan moneter konvensional berdasarkan beberapa pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base.

Ekonomi Islam tidak mengenal ada sistem bunga sehingga kebijakan discount rate tidak dapat diterapkan oleh bank sentral. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga agar dapat mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dengan begitu, ada beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain:⁹

- a. Reserve Ratio merupakan persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
- b. Moral Suasion merupakan tindakan yang dilakukan Bank sentral agar bank-bank dapat meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
- c. Lending Ratio dalam Islam tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).
- d. Refinance Ratio merupakan sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
- e. Profit Sharing Ratio merupakan Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.
- f. Islamic Sukuk merupakan obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.
- g. *Government Investment Certificate* yaitu Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini

⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi., 2007).

dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak bisa di terima dalam Islam , maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: *Government Instrument Certificate*.

Ada beberapa negara dalam menerapkan instrumen kebijakan moneter Islam termasuk Indonesia.¹⁰ BI menjalankan fungsinya bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut:

- 1) Giro Wajib Minimum biasa dinamakan juga statutory reserve requirement (GWM) adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan Persentase tertentu dari dana pihak ketiga.

GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (Prudential Banking) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing.

Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk periode masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Giro wadiah; 2) Tabungan mudharabah; 3) Deposito investasi mudharabah; dan 4) Kewajiban lainnya.

Dana Pihak Ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan Dana Pihak Ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas : a) Giro wadiah; b) Deposito investasi mudharabah; dan c) Kewajiban lainnya. BI mengenakan denda terhadap kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM. Bank yang melakukan pelanggaran juga terkena sanksi.

- 2) Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA) merupakan instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana.
- 3) Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan 19 format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankannya kepada pihak lain sampai

¹⁰ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kebijakan Moneter Syariah," *Jurnal Al-Buhuts* 13, no. 01 (2017): 112.

berakhirnya jangka waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).

- 4) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) merupakan instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam . SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum Rp 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari (misalnya: 7 hari, 14 hari, 30 hari). Pembayaran atau pelunasan SWBI dilakukan melalui debet/kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA.

4. Kebijakan Moneter Islam dalam Pembangunan Ekonomi

Kebijakan moneter merupakan langkah yang diambil bank sentral dalam mengatur pasokan uang yang beredar, dengan tujuan menjaga stabilitas harga, memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Dalam ekonomi Islam , tujuan utama ekonomi moneter lebih fokus kepada sumber daya ekonomi agar tetap beredar dengan memastikan adanya badan usaha ekonomi dan instrumen keuangan syariah yang dapat menyerap potensi dari investasi masyarakat.

Kebijakan moneter Islam dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dengan menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan yang memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi.¹¹

Kebijakan moneter Islam harus bebas dari riba dikarenakan Islam melarang adanya dalam aktivitas ekonomi. Pengelolaan uang dalam Islam berdasarkan pada bagi hasil. Pada zaman Nabi praktik moneter dengan menggunakan standar dirham dan dinar. Dinar dan dirham sebagai alat tukar dan alat pembayaran dengan perbandingan dinar dan dirham 1:10. Islam tidak mengenal adanya inflasi mengingat dinar dan dirham memiliki nilai yang stabil.

Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah mengubah semua sistem keuangan dan perbankan berbasis bagi hasil . Bagi hasil dalam sistem keuangan dan perbankan menghasilkan isu dalam pembangunan ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya keuangan dalam bentuk investasi secara maksimal dan efisien. Namun, pada prinsipnya tujuan kebijakan moneter konvensional dengan Islami tidak jauh berbeda sama-sama menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat dicapai.

¹¹ Faisal Hidayat Dini Abdianti, Anisa Restu, Sholahuddin Al Ayyubi, "Konsep Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 01, no. 03 (2023): 213–26.

Dalam menjaga stabilitas nilai uang maka kerangka kebijakan moneter dalam Islam adalah stok uang, dengan menjamin pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa untuk kesejahteraan sosial. Uang adalah public good tidak dibolehkan untuk ditimbun karena dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Ketika terjadi penimpunan kekayaan maka akan berdampak padapertumbuhan dan pembangunan ekonomi .

Penimbunan kekayaan sangat berimbas pada keberlangsungan perekonomian sebagaimana tertuang pada QS. at Taubah 32 yang artinya; “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalanbatil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Untuk mewujudkan sasaran kebijakan moneter Islam harus dapat mengubah masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam dan melakukan reformasiperekonomian dengan peran serta dari pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan harus sejalan seirama. Sehingga praktik- praktik monopolistik dapat dihilangkan dan melakukan upaya penggalakkan semua faktor yang mampu menghasilkan peningkatan barang dan jasa.

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan beberarapa hal dalam tulisan ini sebagai berikut:

- a. Bank sentral (BI) sebagai otoritas moneter yang meliputi pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan.
- b. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- c. Kebijakan moneter dalam prepektif Islam berpijak pada prinsip dasar ekonomi Islam dengan segala kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Manusia hanya khalifah di bumi bukan pemilik segalanya, segala yang didapatkan oleh manusia adalah atas izin Allah. Kekayaan yang diperoleh manusia maka harus kembali diputar agar dapat orang lain yang kurang dapat merasakan.
- d. Kebijakan moneter dalam prespektif Islam bersumber pada Al-Quran Hadist.

Daftar Pustaka

Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam pada Pembangunan Ekonomi – Dewi Maharani

- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi., 2007.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Dini Abdianti, Anisa Restu, Sholahuddin Al Ayyubi, Faisal Hidayat. "Konsep Kebijakan Moneter dalam Prespektif Ekonomi Islam." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 01, no. 03 (2023): 213–26.
- Luqmanul Hakiem Ajuna. "Kebijakan Moneter Syariah." *Jurnal Al-Buhuts* 13, no. 01 (2017): 112.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Munawar Iqbal dan M. Fahim Khan. "A Survey of Issues And Programme For Research In Monetary And Fiscal Economics of Islam." *Jeddah: ICRIE King Abdul Aziz University*, 1981, 19–21.
- Nanang Sobarna. "Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial* 01, no. 02 (n.d.).
- Safuridar. "Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomika* 02, no. 01 (n.d.).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahyudi, A. "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip - Prinsip Islam ." *Justicia Islam ica* 10, no. 01 (2013).
- Zsasa Aulia Hubara & Surya Alfi Nurrahma Nurul Jannah. "Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia." *Journal Of Management, Accounting, Economic dan Business* 02, no. 04 (2021).